

Perlindungan Hukum terhadap *Debt Collector* yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit

Abd. Rohman

Universitas Narotama Surabaya | abrlawoffice84@gmail.com

Rusdianto Sesung

Universitas Narotama Surabaya

Abstract: Humans as social beings need the help of other humans in meeting their daily needs. In meeting these needs, one of the ways used is to buy goods in a non-cash manner. However, often the payment is not smooth, so as an effort then the creditor/*lessee* using debt collector to take seizure or seizure of motor vehicles. The conclusions of this paper are: (1) the legal relationship between the debt collector and the debtor that is the debt collector in performing his work acts as a lessor based on a power of attorney given by the lessor to the debt collector to collect or take forcibly the collateral object from the debtor, as provided in Article 1792 and Article 1795 Civil Code concerning special power of attorney; and (2) the legal protection of debt collector taking the motor vehicle of credit guarantee object can be applied if the debt collector in conducting its action does not violate the provisions of Article 368 of the Criminal Code (extortion); in addition, in the lease agreement there is a clause which excludes Article 1266 Civil Code, so retrieval of the lease object does not require a judge's verdict.

Abstrak: Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang digunakan adalah membeli barang secara non-tunai. Namun, sering terjadi pembayarannya tidak lancar, sehingga sebagai upaya maka pihak kreditor/*lessee* menggunakan *debt collector* untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, (1) hubungan hukum antara *debt collector* dengan debitor, yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai *lessor* berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* kepada

debt collector untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor, sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus; dan (2) perlindungan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila *debt collector* dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan, di samping itu dalam perjanjian *leasing* tersebut terdapat klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek *leasing* tidak memerlukan putusan Hakim.

Kata kunci: perlindungan hukum, *debt collector*, objek jaminan kredit

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu:¹ kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Di lain pihak, produsen atau pedagang juga menawarkan barang-barang untuk dijual secara kredit bagi konsumen. Cara ini tampaknya lebih menguntungkan, karena segera dapat memiliki, dan menikmati barang, cicilan yang cukup terjangkau.

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 1-2.

Untuk mencukupi kebutuhan manusia/masyarakat tersebut, Pemerintah negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden RI. No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9/ 2009), dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 9/2009 dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan ini didirikan dengan maksud melakukan pembiayaan baik berupa barang modal dan penyediaan dana, adapun selengkapnya dinyatakan sebagai berikut: "Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal".

Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tersebut menurut Pasal 1 angka 2 Perpres No. 9/2009 dilakukan oleh perusahaan pembiayaan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Secara lengkapnya sebagai berikut: "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit". Dalam penulisan ini pembahasan akan dibatasi pada pemberian pembiayaan oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (*leasing*).

Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar. Ada beberapa hal yang memengaruhi mengapa seseorang tidak dapat membayar utangnya, yaitu:²

1. Setelah beberapa kali membayar angsuran, selanjutnya tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya, akrena nakal. Motivasinya konsumen hanya ingin merasakan bagaimana menikmati barang baru.
2. Kemacetan angsuran juga disebabkan karena pihak konsumen banyak utang di sana-sini. Kebutuhan apa saja selalu dipenuhi, dengan tanpa mempertimbangkan penghasilan yang diterima setiap bulannya.

² *Ibid.*, h. 4.

3. Disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diduga sebelumnya, terutama yang berpenghasilan tidak tetap, yang tiba-tiba suatu saat penghasilannya menurun drastis atau bahkan tidak ada.

Dengan kemacetan angsuran ini, sudah tentu pihak kreditor/*lesse* tidak dapat menerima begitu saja, karena dipandang debitor/*lessor* telah ingkar janji, tidak dapat membayar utangnya sebagaimana mestinya. Merasa haknya telah dirugikan, kreditor/*lessee* harus menyelesaikan masalahnya dengan debitor/*lessor* berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perusahaan *leasing* melalui *debt collector* sering melakukan aksinya yaitu: melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit oleh *lessor*, menyingkapi hal tersebut, banyak juga dari masyarakat yang melaporkan tindakan perampasan kendaraan tersebut ke Polisi, dengan laporan bahwa pihak *debt collector* telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.³

Tulisan ini hadir dalam rangka memaparkan dan menganalisis hal tersebut. Lebih jelasnya, tentang perlindungan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit.

B. Perlindungan Hukum Bagi *Debt Collector*

Perlindungan hukum menurut Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

³ Andi Hamzah (Penerjemah), *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Terbaru*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 175.

menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴ Sedangkan menurut Muchsin, bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁷

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan secara profesional. Jika dilanggar harus ditegakkan, yang dengannya bisa terwujud kepastian hukum, yang merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena

⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), h. 3

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakata: Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

⁷ *Ibid.*, h. 44.

dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya.

Aturan hukum berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, dalam hal ini salah satunya yakni perlindungan hukum terhadap pekerja sebagai *debt collector* atau penagih utang sebagai manusia.

Istilah *Debt Collector* ini dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada bank-bank besar di Indonesia. Pihak BNI sendiri menyebutnya dengan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 157-158.

sebutan “Agency Penagihan”. Agency Penagih adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang kartu kredit. Penagihan tersebut hanya dilakukan apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah.⁹ Penggunaan jasa *Agency Penagih* biasanya terkait dengan hutang piutang yang telah memasuki kriteria kredit macet.

Prinsip kerja *debt collector* adalah bekerja berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Hal tersebut mengartikan bahwa *debt collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari kreditur yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Sehingga pekerjaan *debt collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum. oleh karena pekerjaan *debt collector* ini sah-sah saja, maka seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hukum romawi kuno berlaku suatu asas bahwa akibat dari suatu perbuatan hukum hanya berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Dengan demikian maka apabila seseorang menginginkan untuk memperoleh suatu hak, maka ia sendiri harus melakukan perbuatan guna memperoleh hak itu dan tidak dapat di wakilkkan kepada orang lain. Sejalan dengan perkembangan taraf kehidupan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, lambat laun di dalam masyarakat mulai dikenal lembaga perwakilan, sehingga apabila seseorang sendiri melakukan perbuatan hukum guna memperoleh sesuatu

⁹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), h. iii.

hak, maka dapat mengangkat orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.¹⁰

Akan tetapi meskipun dikenal dengan adanya Lembaga perwakilan, namun kenyataannya pada waktu itu yang berkembang dalam lalu lintas hukum adalah Lembaga Perwakilan Tidak Langsung, dimana dalam lembaga perwakilan tidak langsung ini yang bertindak sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan yang bersangkutan adalah yang mewakili sendiri dan dengan demikian akibat hukum dari perbuatannya itu hanya mengikat dirinya sendiri, oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum itu tidak untuk dan atas nama pihak lain. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa pada perwakilan tidak langsung mengandung unsur perwakilan hanya menyangkut hubungan intern antara yang diwakili dan yang mewakili. Akan tetapi Hukum yang dianut oleh negara Perancis sedikit berbeda dimana, yang pada mulanya juga dikenal dengan lembaga perwakilan tidak langsung, namun dengan terjadinya perkembangan yang sangat pesat dalam dunia perdagangan dan karena tuntutan lalu lintas hukum dalam berbagai bidang, maka prinsip dasar yang dianut sebelumnya lambat laun semakin di tinggalkan, untuk kemudian di dalam masyarakat dan lalu lintas hukum mulai dikenal lembaga perwakilan baik berupa pemberian tugas disertai pemberian wewenang (*Lastgeving*), pernyataan pemberian kuasa (*Maahtiging*) maupun *Volmach*, yang semuanya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan satu perkataan, yakni Kuasa.¹¹

Kuasa merupakan pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Pengertian “atas nama” dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk

¹⁰ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, (Bandung: INI-Jawa Barat, 1990), h. 468.

¹¹ *Ibid.*, h. 469.

mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendir. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) di atur dalam buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792-1819 KUHPerdara, sedangkan mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus, baik didalam KUHPerdara maupun di dalam perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa.¹²

Kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Dari pernyataan kehendak pemberi kuasa timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

Perlu diperhatikan akan ketentuan umum, suatu kuasa bersifat privative yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukan suatu peralihan hak. Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Pemberian kuasa adalah

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 413.

suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”, dari pengertian pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu: (1) Perjanjian; (2) Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; dan (3) Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.¹³

Dengan demikian, unsur-unsur dari perjanjian demikian pula syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) harus dipenuhi. Dengan lahirnya perjanjian timbul pula hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1794 KUHPerdara). Dengan diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Jika wewenang mewakili pula pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian.¹⁴

Akta kuasa dapat dibuat dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Apabila dibuat dalam bentuk perjanjian, berarti kedua belah pihak, yakni pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa datang menghadap kepada notaris dan keduanya menandatangani akta kuasa tersebut. Pada kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak, berarti hanya pihak pemberi kuasa yang datang menghadap.¹⁵

¹³ *Ibid.*, h. 416.

¹⁴ *Ibid.*, h. 417.

¹⁵ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 208.

Kuasa yang merupakan tindakan sepihak terjadi karena adanya kewenangan dari pemberi kuasa dan dengan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Pada pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu pemberi kuasa (*lastgever*) juga memberikan kewenangan mewakili kepada penerima kuasa. Apabila wewenang mewakili juga diberikan kepada penerima kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian.¹⁶

Di dalam kuasa perlu adanya ketegasan apakah pihak penerima kuasa berwenang untuk menyerahkan kekuasaan (hak substitusi), baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Oleh karena itu untuk melakukan kekuasaan pemegang kuasa tidak boleh bertindak melampaui batas yang diberikan kepadanya oleh si pemberi kuasa. Pemberi kuasa berkewajiban untuk memenuhi semua perikatan yang telah dilaksanakan oleh pemegang kuasa sesuai dengan kekuasaan yang telah diberikan olehnya kepada pemegang kuasa itu. Selanjutnya pemberi kuasa berkewajiban untuk: “membayar kembali uang di muka (*Voorschotten*) dan biaya (*onkosten*), serta membayar upah jika hal ini memang telah diperjanjikan, demikian pula membayar ganti rugi dan membayar bunga atas persekot tersebut, kepada pemegang kuasa, walaupun urusannya tidak berhasil karena bukan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya pemegang kuasa tersebut”.¹⁷

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 KUHPerdota.

Pasal 1813 KUHPerdota menentukan: “Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya

¹⁶ *Ibid.*, h. 209.

¹⁷ Pasal 1808 KUHPerdota.

si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

Pasal 1814 KUHPerdata menentukan: “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya”.

Pasal 1816 KUHPerdata menentukan: “Pengangkatan kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu pemberian kuasa dapat berakhir karena ditariknya kuasa tersebut oleh si pemberi kuasa atau berakhir dengan pembuatan suatu kuasa baru yang diikuti dengan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa juga berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa.

Pengecualian terhadap ketentuan mengenai berakhirnya kuasa biasanya dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan mengenai berakhirnya kuasa yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata tersebut. Kuasa yang berisikan klausul yang menyatakan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir oleh karena sebab-sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata disebut dengan “kuasa mutlak”.

Pada saat pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada penerima kuasa disitu berpindah wewenang dari pemberi kuasa ke penerima kuasa untuk menjalankan kewajiban yang pemberi kuasa berikan kepada penerima kuasa. Setelah penerima kuasa menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dan juga telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga guna kepentingan kewajiban yang pemberi kuasa berikan, akan tetapi kewajiban penerima kuasa yang sudah melampaui batas perjanjian maka kuasa

tersebut sudah dibatalkan secara sepihak oleh pemberi kuasa.

Dalam Pasal 1792 KUHPerdota terdapat unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah:

- (1) Persetujuan;
- (2) Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan
- (3) Penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa.¹⁸

Unsur pertama dari pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian. Dengan demikian, untuk pemberian kuasa pertama-tama harus dipenuhi unsur dari suatu perjanjian. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah berhadapan dengan suatu perjanjian ataukah dengan tindakan hukum sepihak. Adapun unsur dari perjanjian adalah adanya kata sepakat yang tercapai diantara kedua belah pihak atau lebih, tercapainya kata sepakat tersebut bergantung pada para pihak, kemauan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan salah satu pihak atas beban pihak yang lain atau timbal balik, tercapainya kata sepakat juga dengan mengindahkan persyaratan (bentuk perjanjian) perundang-undangan.¹⁹

Setelah mengetahui bahwa memang berhadapan dengan suatu perjanjian, agar perjanjian tersebut sah harus pula dipenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*, h. 54.

¹⁹ *Ibid.*, h. 54.

Unsur kedua dari pemberian kuasa, yaitu memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas.²⁰ Dari unsur kedua ini lahirlah suatu perjanjian yang mana seperti tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdara: “satu perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Unsur ketiga di mana penerima kuasa melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang membawa akibat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tindakan hukum dari pemberi kuasa. Dari unsur ketiga ini timbullah akibat dari persetujuan kedua belah pihak maka dapat dikatakan timbul akibat perjanjian dari kedua belah pihak yang sepakat akan perjanjian itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Syarat-syarat perjanjian lisan atau tulisan berbeda pentingnya dan dapat diklasifikasikan menjadi syarat pokok (*condition*), dan syarat pelengkap (*warranty*). Syarat pokok (*condition*) adalah syarat yang penting, yang merupakan syarat vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak adanya ketaatan akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau melepaskan perjanjian itu. Secara alternatif, pihak yang dirugikan itu jika menginginkan dapat meneruskan perjanjian itu tetapi memperoleh penggantian bagi kerugian yang telah dideritanya. Syarat pelengkap (*warranty*) adalah syarat yang kurang penting tidak adanya ketaatan terhadap syarat ini akan menyebabkan kerugian, tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran

²⁰ *Ibid.*

syarat pelengkap ini hanya akan memberikan kepada pihak yang dirugikan itu hak untuk menggugat pembayaran ganti rugi bukan membatalkan atau melepaskan perjanjian.²¹

Penyusunan suatu kontrak harus dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. *Predictable*, dalam perancangan dan analisa kontrak seorang daftar harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi yang ada kalanya dengan kontrak yang disusun.
2. *Provider*, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi.
3. *Protect of law*, perlindungan hukum terhadap yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisnis dari kemungkinan terburuh dalam menjalankan bisnis.²²

Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk yang konkrit, misalnya asas konsensualitas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka untuk mengikatkan diri. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit.²³ Pendekatan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan manusia yang fundamental. Kontrak adalah metode dimana hak-hak fundamental manusia dapat dialihkan.²⁴ Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak kontrak, demikian juga untuk mengatur isi kontrak.²⁵

²¹ Abdul Kadir., *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 139.

²² Scoott J. Burham, *Drafting Contract*, (Montana: The Minchie Company, 1992), h. 2.

²³ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 119.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 17.

²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 12.

C. Analisis Penerapan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Terhadap *Debt Collector* yang Mengambil Kendaraan Bermotor yang Digunakan Lessee

Penggunaan jasa *Debt Collector* oleh Bank atau lembaga leasing dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam perjanjian *leasing* ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkanya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.²⁶

Dalam perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/*supplier* barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namundi Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian disewagunakan kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sinipengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan.

Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia (FEO – *Fiduciare Eigendom Overdracht*). Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda

²⁶ Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 200.

motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tadi, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/objek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu "*Straf*".²⁷

Menurut Moeljatno istilah "hukuman" atau "*straf*" merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar/inkonvensional untuk menggantikan "*Straf*" adalah "Pidana". Hal tersebut sesuai dengan istilah "*strafrecht*" yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari "Hukum pidana". Dengan demikian, maka istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana.²⁸

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor di jalan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain *secara melawan*

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 42

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 54.

hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

Rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

1. Perbuatan memaksa (*dwingen*)

Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan, Adami Chazawi menerangkan sebagai berikut:²⁹ Seseorang (petindak) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa: agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak petindak dengan kehendak orang itu (korban).

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2006), h. 53.

Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak petindak yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian ini membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan Ketidakberdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi, sesuatu yang dikehendaki petindak.

Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHP. Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.

Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak, dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri.

Dalam kaitan dengan tindakan *debt collector* mengambil kendaraan yang *dileasedkan* kepada *lessee*, apabila *lessee* wanprestasi/ingkar janji, tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara kekerasan seperti ancaman yang menimbulkan rasa takut dan cemas dari *lessee*.

2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang

Orang di sini, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan hutang. Menurut Adami Chazawi, "Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang

memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.³⁰ Dalam perjanjian *leasing* yang dimaksud “orang” adalah baik pihak *lessor* maupun pihak *lessee*.

3. Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan materiil (perbuatan jasmani), karenanya harus aktif, dan juga berupa perbuatan yang bersifat abstrak. Perbuatan yang bersifat abstrak ini akan menjadi lebih kongkret sifatnya dan lebih terbatas wujudnya, setelah dihubungkan dengan upaya atau cara melakukannya yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.³¹

Upaya memaksa yang biasanya dilakukan oleh *debt collector* dengan cara: mengancam, membuat malu *lessee* dengan menyebarkan kata-kata ke teman-teman *lessee* bahwa *lessee* tidak membayar utang, menarik atau mengambil secara paksa, mendatangi *lessee* tiap waktu baik di rumah, di tempat kerja dan dimanapun tempat dan menggangukannya dengan sodoran tagihan-tagihan yang belum dibayar *lessee*.

4. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang menghapuskan Piutang

Disebut sebagai tujuan, oleh karena: perbuatan memaksa ditujukan pada 3 akibat tersebut (disebut akibat konstitutif), yang sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam diri petindak terdapat suatu pikiran/kesadaran bahwa untuk mencapai maksud menguntungkan diri sendiri maupun diri orang lain itu (unsur subjektif pemerasan), harus terjadinya orang menyerahkan barang, orang memberi hutang, atau orang menghapuskan piutang.

³⁰ *Ibid.*, h. 54.

³¹ *Ibid.*

Tiga unsur ini adalah berupa unsur objektif dan berupa indikator dari selesai/terjadinya kejahatan pemerasan. Apabila perbuatan memaksa sudah terjadi, tetapi akibat tidak ada atau belum timbul, maka terjadi percobaan pemerasan, dan apabila akibatnya sudah timbul maka selesailah pemerasan.³²

Tentang benda, adalah benda yang sama pengertiannya dengan benda dalam pencurian, yaitu benda bergerak dan benda berwujud. Benda ini harus milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Tidak disyaratkan harus milik korban (orang yang dipaksa), dapat juga milik orang lain selain orang yang dipaksa.

Untuk selesai atau timbulnya pemerasan, tidak bergantung pada perbuatan petindak, tapi justru pada perbuatan orang lain (korban) apakah korban melakukan perbuatan menyerahkan ataukah tidak, walaupun petindak telah melakukan perbuatan memaksa. Perbuatan menyerahkan benda adalah unsur akibat konstitutif sebagaimana di atas sudah dijelaskan.

Menyerahkan barang adalah berupa perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan atasnya, yang pada umumnya ke dalam kekuasaan petindak. Dikatakan pada umumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ke tangan orang suruhan petindak.

Perbuatan menyerahkan benda dikatakan selesai apabila menurut kenyataannya kekuasaan atas benda tersebut telah lepas dari kekuasaan korban dan secara mutlak beralih ke dalam kekuasaan petindak. Dapat disebut benda tersebut telah nyata-nyata beralih kekuasaannya ke tangan petindak, apabila petindak sudah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu.

³² *Ibid.*, h. 55.

Apakah merupakan syarat bahwa yang menyerahkan barang adalah orang yang mengalami paksaan sendiri? Tidak, orang lain (pihak ketiga) dapat juga menjadi perantara dalam hal penyerahan benda tersebut, asalkan penyerahan oleh orang lain (pihak ketiga) itu, adalah diakibatkan langsung oleh adanya paksaan, dan yang diserahkan adalah benda yang dimaksudkan petindak. Di sini harus ada *causal verband* antara memaksa dengan penyerahan benda, begitu juga dengan orang memberi hutang dan menghapuskan piutang.

Tentang memberi hutang, yang dimaksudkan bukan semata-mata memperoleh pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan mempunyai pengertian yang lebih luas, yakni berupa mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan ia (korban) harus membayar sejumlah uang.³³

Seseorang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membeli suatu benda, karena takut ia membeli benda itu. Di sini timbul akibat korban membayar sejumlah uang, yaitu harga barang itu. Begitu juga dengan menghapuskan piutang, tidak semata-mata berarti mengadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

Kini baik tentang memberi hutang maupun menghapuskan piutang, apakah disyaratkan secara mutlak bahwa yang memberi hutang itu harus antara petindak dengan korban, atau dalam hal menghapuskan piutang itu harus antar petindak (orang yang memaksa) dengan korban (orang yang dipaksa)? Menurut redaksi Pasal 368 KUH Perdata, tidak ada keharusan yang demikian. Dapat saja orang yang memberi hutang atau yang menghapuskan piutang itu antara pihak ketiga dengan korban, asalkan

³³ *Ibid.*, h. 56.

pemberian hutang atau menghapuskan piutang itu, benar-benar diakibatkan langsung dari adanya paksaan itu, dan memberi hutang atau hapusnya piutang sebagai demikian yang menjadi tujuan dari petindak.

Contohnya, A memaksa B dengan kekerasan agar kewajiban C untuk menyerahkan harga pembelian sepeda kepada B menjadi hapus. Hal ini dapat dilihat dari unsur subjektifnya bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang lain ini adalah pihak ketiga. Apakah dengan memaksa tersebut benar-benar kewajiban penyerahan uang menjadi hapus, dengan kata lain kewajiban penyerahan sejumlah uang bagi petindak terhadap orang lain (korban) benar-benar menurut hukum menjadi hapus? Juga sebaliknya dalam hal memberi hutang, apakah benar-benar timbul perjanjian dengan kewajiban korban harus membayar sejumlah uang itu menurut hukum telah benar-benar timbul?

Tidak demikian adanya, menurut hukum tidak dapat mengakhiri suatu kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang ada dalam suatu perjanjian, dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu sebaliknya, menurut hukum tidak dapat terjadi suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada orang lain (korban) untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apakah pemerasan ini berupa tindak pidana formil ataukah tindak pidana materiil?

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang melarang untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang melarang menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini apabila melihat dari sudut perbuatan, yakni perbuatan memaksa, maka pemerasan ini adalah berupa tindak pidana formil. Ada persoalan berkenaan dengan selesainya suatu tindak pidana formil.

Untuk selesainya/timbulnya tindak pidana formil bergantung pada selesai/terjadinya perbuatan yang dilarang yang dirumuskan dalam redaksinya. Namun pada pemerasan (begitu juga pada pengancaman dan penipuan), belum cukup untuk selesainya kejahatan itu hanya oleh karena selesainya melakukan perbuatan yang dilarang saja, melainkan harus pula dari perbuatan itu sudah timbul akibat yang dilarang, yakni benar-benar benda yang dimaksud sudah diserahkan, dan lain sebagainya. Dari sudut ini pemerasan adalah berupa tindak pidana materiil.

5. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri, ialah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus telah terwujud. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan.

Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

D. Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara *debt collector* dengan debitor yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai *lessor* berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari *lessor* kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.
2. Perlindungan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila *debt collector* dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi karena dalam perjanjian *leasing* telah diperjanjikan pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek *leasing* tidak memerlukan putusan Hakim, dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan antara *lessor* dengan *lessee*.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni, 1980.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang, Bayumedia, 2006.
- Andi Hamzah. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Terbaru*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.

- Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Herlien Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____. *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Komar Andasasmita. *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*. Bandung, INI-Jawa Barat, 1990.
- Masrudi Muchtar. *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2013.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Scoott J. Burham. *Drafting Contract*. Montana, The Minchie Company, 1992.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.